

**HUBUNGAN ANTARA KONDISI SOSIAL EKONOMI DENGAN JUMLAH
PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nailul Rahmah

NIM. 210802101

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nailul Rahmah
NIM : 210802101
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara
Tempat Tanggal Lahir : Pineung, 10 November 2002
Alamat : Gampong Meunje Mesjid

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2025

Yang Menyatakan



Nailul Rahmah

NIM. 210802101

HUBUNGAN ANTARA KONDISI SOSIAL EKONOMI DENGAN JUMLAH PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Nailul Rahmah

NIM. 210802101

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Saïd Amirul Kamar, M.M.,M.Si

NIP.196110051982031007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**HUBUNGAN ANTARA KONDISI SOSIAL EKONOMI DENGAN JUMLAH
PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH**

NAILUL RAHMAH

NIM. 210802101

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakulta Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana (S1) Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H

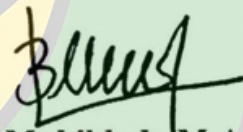
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Said Amirul Kamar, M.M., M.Si
NIP.196110051982031007

Sekretaris



Muhibbah, M.Ag
NIP: -

Penguji I



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji II



Putri Marzaniar, MPA.
NIP. 199811022024032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muli Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan, terutama di kota-kota besar seperti Banda Aceh. Fenomena ini menjadi tantangan dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan publik terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, khususnya Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui angket yang disebarakan kepada 100 responden menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan yang cukup positif terhadap upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan pemerintah, meskipun masih terdapat tantangan yang signifikan seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam upaya preventif dan rehabilitatif masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran, penguatan SDM, serta pelibatan masyarakat secara aktif agar kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pandangan Publik, Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Kebijakan Sosial, Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji beserta syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-NYA, sehingga terlepas dari keterbatasan dan kekurangan peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul “Hubungan Antara Kondisi Sosial Ekonomi Dengan Jumlah Pengemis di Kota Banda Aceh”. Selanjutnya, Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para alim ulama.

Adapun Tujuan dari penyusunan skripsi skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna demi me peroleh gelar sarjana Prodi Ilmu Aministrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi skripsi ini peneliti menyadari tidak terlepas dari bantuan pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak telah memberikan ide dan meluangkan waktu untuk membantu peneliti. Maka, dengan rasa hormat dan pada kesempatan istimewa ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Akan tetapi, peneliti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan ini. Proses penyusunan laporan magang ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada peneliti baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyiapan data-data yang diperlukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Reza Idria, MA., PhD. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Muazzinah, B.Sc., M.PA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tidak pernah bosan dalam memberikan arahan dan motivasi serta membimbing peneliti dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
10. Teman-Teman seangkatan Ilmu Administrasi Negara 2021. Terima kasih untuk setiap kerjasamanya dan dukungan selama ini.
11. Kepada cinta pertama dalam hidup penulis, Alm Bapak Zulkifli Risyad seorang ayah yang penulis rindukan dan menjadi alasan penulis bertahan sejauh ini. Kehadiranmu yang penuh kasih tetap hidup di dalam hati dan menjadi sumber kekuatan yang tidak ternilai. Penulis berterima kasih atas kenangan, tawa, dan kebersamaan, yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *You Will Always be in My Heart, I always miss you dad.*
12. Kepada mama tercinta, ibu Haryani perempuan yang hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih untuk doa ibu yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini, semoga mama sehat selalu.

13. Kepada saudara-saudari penulis, Murtadha, Dewi Lindayani dan Zahara Amalia.

Terima kasih telah memberi dukungan, solusi serta semangat dan motivasi selama ini, serta doa yang terbaik untuk penulis.

14. Terakhir kepada diri saya sendiri Nailul Rahmah. Terima Kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian perjalanan Panjang ini, meskipun sering ingin menyerah dan merasa putus asa. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.*

Peneliti tidak dapat dapat membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan dan juga peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang berguna untuk proses penyempurnaan skripsi ini sangat peneliti harapkan. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 22 Maret 2025

Peneliti,

Nailul Rahmah

NIM. 210802101



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... i

PENGESAHAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah..... 6

1.3. Tujuan Penelitian 7

1.4. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1. Penelitian Terdahulu 9

2.2. Landasan Teori..... 11

2.2.1. Teori Public Value..... 11

2.2.2. Konsep Penanganan Gelandangan dan Pengemis 14

2.3. Kerangka Berpikir..... 19

BAB III METODE PENELITIAN..... 20

3.1. Desain Penelitian 20

3.2. Definisi Operasional Variabel..... 21

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 21

3.4. Populasi dan Sampel 22

3.4.1. Populasi 22

3.4.2. Sampel 23

3.5. Teknik Pengumpulan Data..... 24

3.5.1.	Angket (Kuesioner)	24
3.6.	Jenis dan Sumber Data	26
3.6.1.	Data Primer	26
3.6.2.	Data Sekunder	26
3.7.	Teknik Analisis Data	26
3.7.1.	Uji Validitas	27
3.7.2.	Uji Reliabilitas	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		29
4.1.	Profil Lembaga Dinas Sosial Aceh	29
4.1.1.	Sejarah Dinas Sosial Aceh	29
4.1.2.	Visi Misi Dinas Sosial Aceh	30
4.1.3.	Tujuan	31
4.1.4.	Sasaran	32
4.1.5.	Struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh	33
4.2.	Karakteristik Responden Penelitian	44
4.2.1.	Responden Menurut Jenis Kelamin	44
4.2.2.	Responden Menurut Rentang Usia	45
4.2.3.	Responden Menurut Pendidikan Terakhir	45
4.3.	Uji Coba Instrumen	45
4.3.1.	Uji Validitas Data	46
4.3.2.	Uji Reliabilitas Data	48
4.4.	Deskripsi Jawaban Responden	49
4.4.1.	Public Value	49
4.4.2.	Penanganan Gelandangan dan Pengemis	50
4.5.	Hasil Analisis Data	51
4.5.1.	Hasil Data Distribusi Frekuensi Variabel Public Value	51
4.5.2.	Hasil Data Distribusi Frekuensi Variabel Penanganan Gelandangan dan Pengemis	58
4.6.	Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V PENUTUP		69
5.1.	Kesimpulan	69

5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengemis di Kota Banda Aceh	5
Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel	21
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh 2024	22
Tabel 3.3 Variabel, Indikator.....	25
Tabel 3.4 Pemberian Skor Untuk Jawaban Kuesioner	25
Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Rentang Usia	45
Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	45
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Reliabilitas.....	48
Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Publik Value	49
Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis	50
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Indikator Legitimasi dan Dukungan	51
Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Indikator Kemampuan Operasional.....	53
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Indikator Nilai Substansial.....	56
Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Indikator Upaya Preventif	58
Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Indikator Upaya Koersif.....	60
Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Indikator Upaya Rehabilitatif.....	62
Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Indikator Reintegrasi Sosial	64

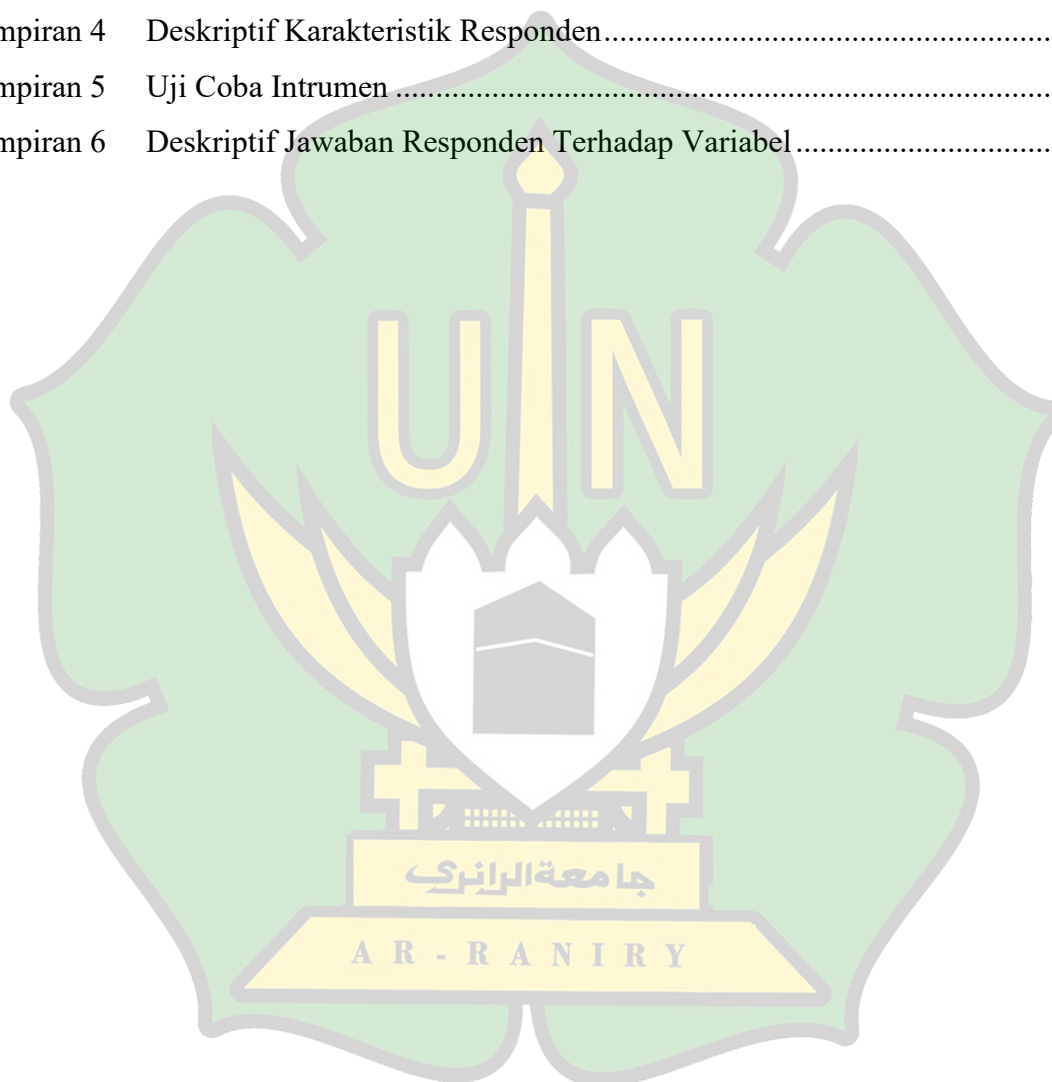
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Dinas Sosial Aceh.....	30
------------	------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh.....	72
Lampiran 2	Kuesioner	73
Lampiran 3	Tabulasi Data	82
Lampiran 4	Deskriptif Karakteristik Responden.....	86
Lampiran 5	Uji Coba Intrumen	86
Lampiran 6	Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Variabel	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang dapat menjadi ancaman dan hambatan bagi pembangunan nasional, khususnya pengentasan kemiskinan dan upaya peningkatan sumber daya manusia. Gelandangan dan pengemis pada dasarnya adalah warga negara yang tergolong miskin yang berpindah ke kota untuk mengais rezeki.¹

Banyaknya gelandangan dan pengemis yang sering terlihat di setiap perempatan dan jalan utama tidak hanya tidak enak dipandang mata, tetapi sudah menjadi masalah serius yang bukan hanya tidak enak dipandang, tetapi merupakan masalah serius yang harus dipecahkan bersama. Gelandangan dan pengemis biasanya berada pada usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga tidak dapat mengikuti atau tersingkir dari ketatnya persaingan hidup.²

Dalam menata kehidupan dan penghidupannya, gelandangan dan pengemis tidak lagi memperhatikan sistem nilai/norma dan bahkan agama, sehingga menjurus kepada perbuatan tercela dan dapat mengakibatkan terganggunya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tentang penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar, dan tuna sosial lainnya di wilayah Kota Banda Aceh. Dalam peraturan ini, gelandangan didefinisikan sebagai individu yang hidup dalam kondisi tidak sesuai dengan norma kehidupan layak, tanpa mata pencaharian, dan tanpa tempat tinggal tetap. Sementara itu, pengemis adalah individu atau kelompok, termasuk yang mengatasnamakan lembaga sosial, yang mencari penghasilan dengan

¹ Ibnu hajar, "Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Gelandangan Melalui Pendidikan Life Skill," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 16, No. 2 (2022): hlm. 1-7.

² Sutri Helfianti, "Penertiban Pengemis Di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018" *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. XI, No. 9 (2023): hlm. 1-10.

meminta-minta di jalanan atau tempat umum, dengan tujuan mengharapkan belas kasihan orang lain.³

Dalam Pasal 21 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 menjelaskan tentang larangan terkait aktivitas gelandangan dan pengemis, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mengatasi permasalahan ini secara lebih efektif. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan sejumlah tindakan yang dapat memicu atau mendukung keberadaan gelandangan dan pengemis.

Setiap individu, baik secara perorangan maupun berkelompok, dilarang melakukan aktivitas menggelandang atau mengemis dengan alasan, cara, atau menggunakan alat apa pun yang bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan dari orang lain, serta segala bentuk aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban di ruang publik. Selain itu, tidak diperbolehkan memperlakui orang lain dengan mendatangkan seseorang atau sekelompok orang dari dalam maupun luar daerah untuk tujuan melakukan aktivitas menggelandang atau mengemis. Masyarakat juga dilarang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, atau mengkoordinasi orang lain, baik secara individu maupun berkelompok, yang dapat menyebabkan terjadinya aktivitas gelandangan dan pengemis. Menyediakan atau memfasilitasi tempat tinggal bagi pengemis atau peminta-minta juga dilarang guna menghindari berkembangnya aktivitas tersebut dan memastikan bahwa gelandangan dan pengemis dapat diarahkan ke solusi yang lebih baik melalui program-program rehabilitasi sosial.⁴

Pasal ini menegaskan tanggung jawab semua pihak untuk tidak hanya menghindari keterlibatan dalam aktivitas terkait gelandangan dan pengemis, tetapi juga untuk tidak mendukung atau memfasilitasinya dalam bentuk apa pun. Dengan penegakan aturan ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sejahtera. Adapun pada Pasal 18 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 mengatur secara rinci tentang peran serta masyarakat dalam upaya penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar, dan tuna sosial lainnya di wilayah Kota Banda Aceh. Masyarakat

³ Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tentang penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar, dan tuna sosial lainnya di wilayah Kota Banda Aceh.

⁴ Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tentang penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar, dan tuna sosial lainnya di wilayah Kota Banda Aceh, hlm. 11.

memiliki tanggung jawab untuk turut aktif dalam penanganan masalah ini melalui berbagai langkah.

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindakan menggelandang, mengemis, serta keberadaan orang terlantar dan tuna sosial di lingkungan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan sesuai dengan norma kehidupan yang layak. Apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis, orang terlantar, atau tuna sosial, masyarakat wajib melaporkannya kepada perangkat kecamatan melalui Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESSOS) yang berada di masing-masing kecamatan, agar pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang tepat dan terkoordinasi. Selain itu, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk upaya penjangkauan terhadap gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya, serta penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi sosial.

Partisipasi ini dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau melalui organisasi seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan harus mendapatkan rekomendasi resmi dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif.⁵ Dengan adanya regulasi ini, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan bebas dari masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis.

Pengemis dapat dikenali melalui sejumlah ciri khas yang cukup menonjol, di antaranya adalah tidak adanya batasan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, serta umumnya berada dalam rentang usia dewasa, yakni antara 18 hingga 59 tahun. Aktivitas sering terlihat di berbagai lokasi yang ramai dikunjungi orang, seperti area pemukiman penduduk, toko-toko, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar tradisional atau modern, rumah ibadah, serta tempat-tempat umum lainnya yang memungkinkan untuk meminta sedekah.

Dalam upaya menarik perhatian dan simpati, sering kali dilakukan tindakan-tindakan yang dirancang untuk membangkitkan rasa iba, misalnya dengan berpura-pura

⁵ Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tentang penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar, dan tuna sosial lainnya di wilayah Kota Banda Aceh, hlm. 9-10.

sakit, merintih kesakitan, atau bahkan berdoa dengan khusyuk, sambil menyampaikan alasan-alasan tertentu yang diharapkan dapat memicu pemberian uang atau bantuan. Meskipun kerap terlihat berkeliaran di ruang publik, pengemis pada umumnya tetap mampu berbaur dengan masyarakat sekitar dan tidak jarang memiliki tempat tinggal tetap atau lokasi tertentu yang dijadikan sebagai basis aktivitas sehari-hari. Pola atau rutinitas tertentu juga sering terlihat, seperti kembali ke tempat tinggal setelah seharian memintaminta atau berkumpul dengan sesama pengemis di lokasi-lokasi tertentu.⁶

Fenomena gelandangan dan pengemis menjadi masalah di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh. Modernisasi dan industrialisasi telah menyebabkan banyaknya jumlah pengemis di kota-kota besar seperti Kota Banda Aceh. Mengemis di perkotaan, terutama di kota-kota besar, merupakan fenomena yang mulai dilihat sebagai masalah serius, terutama mengingat meningkatnya masalah sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkannya.⁷

Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah tersebut. Kota ini dipenuhi oleh berbagai fasilitas modern, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, serta sarana hiburan, yang mencerminkan kemajuan ekonomi dan menarik perhatian masyarakat desa untuk datang dan mencoba mengubah nasib individu tersebut. Banyaknya peluang dan kemudahan akses ke berbagai sektor ekonomi membuat kota ini menjadi tujuan utama urbanisasi.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa laju urbanisasi yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Banyak pendatang yang kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di kota, sehingga sulit bersaing dalam mencari pekerjaan. Ketatnya persaingan kerja di Kota Banda Aceh semakin memperburuk situasi bagi individu yang datang tanpa persiapan atau pendidikan yang memadai. Akibatnya, sebagian dari individu tersebut

⁶ Sutri Helfianti, *Penertiban Pengemis Di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018*, 2023, hlm. 1-10.

⁷ Shara Vanisha, "Fenomena Pengemis Lansia Di Banda Aceh," *Journal of Ar-Raniry on Social Work*, Vol. 2, No. 1, (2024): hlm. 2.

memilih jalan pintas untuk bertahan hidup dengan menjadi pengemis di Kota Banda Aceh. Berikut data jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.⁸

Tabel 1.1
Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2021	48	10	58
2022	40	25	65
2023	16	6	22
2024* _{Agst}	36	16	52
Jumlah	140	57	197

Sumber: Dinas Sosial Aceh (2024)

Berdasarkan data di atas, selama empat tahun terakhir Kota Banda Aceh telah mengalami perubahan signifikan dalam jumlah pengemis, yang mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, jumlah pengemis yang tercatat mencapai 58 orang. Ini menunjukkan adanya permasalahan sosial yang cukup menonjol, meskipun dalam konteks kota yang berusaha menjaga ketertiban sosial. Namun, pada tahun 2022, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 65 orang.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis dalam jumlah pengemis, hanya tercatat sebanyak 22 orang. Penurunan ini bisa jadi merupakan hasil dari intervensi strategi yang lebih ketat, program bantuan sosial yang lebih efektif, atau inisiatif komunitas yang berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun, meskipun penurunan ini tampak sebagai perkembangan positif, angka pengemis kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 52 orang.

Data ini memperlihatkan dinamika yang kompleks dari masalah pengemis, dengan faktor-faktor yang berkontribusi bervariasi setiap tahunnya. Pengemis masih terlihat di sejumlah tempat di Banda Aceh, seperti pusat perbelanjaan, terminal, warung kopi, perempatan jalan, dan tempat-tempat padat lainnya. Bahkan, pengemis sudah mulai menysar tempat-tempat wisata.

⁸ Shara Vanisha, "Fenomena Pengemis Lansia Di Banda Aceh," *Journal of Ar-Raniry on Social Work*, Vol. 2, No. 1, (2024): hlm, 4.

Sejauh ini, menurut pengamatan peneliti, pemerintah masih belum menunjukkan kinerja maksimal dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang signifikan, seperti lemahnya penegakan hukum, belum tersedianya rumah singgah yang layak bagi gelandangan dan pengemis, serta peran stakeholder yang belum optimal dalam melakukan penanganan secara komprehensif. Selain itu, anggaran yang tersedia untuk program pembinaan masih sangat terbatas, sehingga menghambat upaya penanggulangan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi himbauan larangan memberikan sedekah kepada pengemis, yang turut berkontribusi pada semakin meningkatnya jumlah pengemis di Aceh.⁹

Selain itu, peneliti juga menyoroti bahwa gelandangan dan pengemis sering kali dimarjinalkan atau dikucilkan oleh masyarakat. Marginalisasi ini terjadi karena status sosial gelandangan dan pengemis yang dipandang rendah atau tidak sesuai dengan norma dan ekspektasi sosial yang berlaku. Akibatnya, gelandangan dan pengemis tidak hanya menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi juga beban sosial dan psikologis yang berat karena stigma negatif yang dilekatkan oleh lingkungan sekitar.

Situasi tersebut menjadi alasan utama yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian secara komprehensif. Penelitian komprehensif di sini berarti mendalami isu gelandangan dan pengemis dari berbagai sudut pandang, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan, dengan tujuan memahami akar permasalahan secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang luas dan mendalam, peneliti berharap dapat memberikan solusi atau rekomendasi terhadap penanganan gelandangan dan pengemis secara berkelanjutan di Kota Banda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Agar memudahkan menganalisis problematik yang terjadi, maka bisa dirumuskan masalah yang bakal diteliti yaitu:

1. Bagaimana pandangan publik terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?

⁹ Wahyu Ramadhani, *Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)*, 2021, hlm. 3.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji serta menganalisis pandangan public terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan ke pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk membantu pemerintah dalam membuat strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi jumlah pengemis di Kota Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1.4.1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial yang membahas persepsi publik terhadap kebijakan sosial, terutama dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Dengan adanya penelitian ini, kajian mengenai stigma sosial dan persepsi masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pandangan publik serta bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan dasar atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dari perspektif yang berbeda, baik dari sisi kebijakan, psikologi sosial, maupun ekonomi.

1.4.2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan humanis dalam menangani gelandangan dan pengemis, baik dalam bentuk regulasi, program rehabilitasi, maupun pemberdayaan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, sehingga dapat mengurangi stigma negatif serta meningkatkan empati sosial.

Lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah (LSM) juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun program pemberdayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan gelandangan dan pengemis, sehingga dapat membantu gelandangan dan pengemis keluar dari kondisi keterpurukan sosial dan ekonomi.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi akademisi dan peneliti lainnya yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan sosial dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dalam menangani permasalahan sosial yang kompleks ini.

